

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)
ANGKATAN II TAHUN 2026**

**POLA KERJASAMA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2026**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
(PKP) ANGKATAN II POLA KERJASAMA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG DENGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural eselon IV memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan memimpin bawahan dan seluruh *stakeholder* strategik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi bawahan dan *stakeholder* strategisnya dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon IV seperti tersebut di atas, penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang bertujuan sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin operasional dirasakan tidak cukup. Dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural eselon IV memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi dan memimpin bawahan dan seluruh pemangku kepentingan strategik untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi dan kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi bawahan dan pemangku kepentingan strategisnya dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang inovatif, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya.

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas seperti ini, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan memimpin perubahan inilah yang kemudian menentukan keberhasilan peserta tersebut dalam memperoleh kompetensi yang ingin dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Dengan demikian, pembaharuan PKP ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.

Kompetensi yang dibangun pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan :

1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya;
2. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi;
3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi;
4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien;
5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya.

BAB II

DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566)
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 317/K.1/ PDP.09/ 2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1/K.1/PDP.07 /2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 2/K.1/PDP.07/ 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138)
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 117)
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8)
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8)
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11)
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2)

BAB III

PERENCANAAN PELATIHAN

A. PESERTA

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026 diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) orang peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan peserta sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	OPD
1	Budhi Tri Nasril, ST	Kepala Seksi Inspeksi Dinas Pemadam Kebakaran
2	Argya Cadipa Bomantara, S.STP., M.M	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3	Priyo Sarjono, ST	Lurah Barusar Kecamatan Semarang Selatan
4	Rimajantu Sadmoko, S.Kom	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
5	Catur Setya Nugroho, SH	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
6	Didie Wahyu Wulanardi, S.H., M.M.	Kepala Subbidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Indrayani Kesumastuti, SH, MH	Kepala Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
8	Nany Marlina, SE.M.Si,Akt	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	NAMA / NIP	OPD
9	Novita Amalia, ST, MT	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Riset Dan Inovasi Daerah
10	Vincentia Putri Kirana Laksmi, SE, MM	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
11	Gunawan Heruwibowo, ST	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro
12	Khoirul Huda, ST	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
13	Suryono, SH	Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat
14	Priyo Budi Utomo, S.Pd., M.M.	Lurah Ngijo Kecamatan Gunungpati
15	Andi Ariana Fitriani Sukonyono, S.Sos	Lurah Tambakharjo Kecamatan Semarang Barat
16	Indah Mayang Karti, S.Farm. Apt., M.M.	Kepala UPTD Dinas Kesehatan
17	Nuryati Purwaningsih, S.SI	Lurah Pudakpayung Kecamatan Banyumanik
18	Septi Anggraini, SH	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tugu
19	Sri Eko Utami, SE	Lurah Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk
20	Anna Melina Wijaya, SE	Lurah Kalicari Kecamatan Pedurungan

NO	NAMA / NIP	OPD
21	Budi Susetiyo, S.STP	Kepala Subbagian Perencanaan,Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Pedurungan
22	Dany Prasatya Utomo, S.STP, MM	Lurah Karangturi Kecamatan Semarang Timur
23	Dwi Setyo Febrianto, ST	Lurah Cepoko Kecamatan Gunungpati
24	Sigit Kurniawan, S.Sos	Lurah Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan
25	Chairul Anas, SE	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk
26	Dian Amaliasari, SE	Lurah Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan
27	Dyar Oktaningrum, S.IP	Lurah Sumurboto Kecamatan Banyumanik
28	Evi Lianasari, S.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
29	Joko Yulianto, S.Kom	Lurah Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara
30	Hesti Indri Mayawati, S.ST,M.Si	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat DPRD

B. TENAGA PENGAJAR

Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 terdiri dari Tenaga Pengajar yang meliputi widyaiswara, pakar, praktisi, dan narasumber lainnya yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola perubahan. Untuk WI yang perlu disampaikan bahwa peserta terbagi 3 kelompok sehingga diperlukan 3 orang Coach dan 3 orang Narasumber seminar di masing-masing angkatan.

C. FASILITAS PELATIHAN

Fasilitas yang di sediakan bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026 meliputi akomodasi, konsumsi, sarana pembelajaran, dan pelayanan kesehatan. Penyelenggara telah menyiapkan Gedung / Asrama Balai Diklat. Sedangkan fasilitas yang dimiliki Balai Diklat antara lain meliputi: asrama, ruang kelas, ruang makan, ruang sekretariat, ruang ibadah/mushola, halaman luas untuk kegiatan *outdoor* dan fasilitas pendukung lainnya seperti meja dan kursi, sound system, white board, flipchart, komputer/laptop, LCD proyektor, alat peraga pembelajaran, dan teknologi multimedia.

D. DESEMILASI PELATIHAN

Metode yang dipergunakan dalam diklat ini adalah partisipatif dimana peserta diharapkan untuk aktif terlibat dalam setiap *event* pembelajaran. Metode ini sangat sesuai dengan kondisi peserta yang keseluruhannya adalah orang dewasa, dengan proses belajar adalah *andragogy*, dimana para peserta diklat dipacu untuk berpartisipasi secara aktif selama proses belajar berlangsung.

Adapun dalam penerapan pendekatan *andragogy* meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Para peserta diajarkan bentuk pembelajaran yang mampu melahirkan sasaran pembelajaran (lulusan) yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dan mampu menjadi guru bagi dirinya sendiri.

2. Peserta dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi dua arah sehingga memberi kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuan menganalisis masalah.
3. Kekayaan pengalaman peserta merupakan potensi positif dalam proses belajar mengajar yang berorientasi pada masalah-masalah aktual yang dihadapi peserta dalam melaksanakan tugasnya sehingga perlu dicari pemecahannya.

BAB IV

PELAKSANAAN PELATIHAN

A. PEMBUKAAN

Hari, Tanggal : Senin, 27 April 2026

Tempat : Gedung Graha Wiyata Praja BKPP Kota Semarang
Jl. Fatmawati, No. 73 A Semarang

Keterangan : Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026 diikuti oleh 90 (sembilan puluh) orang Peserta Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan dibuka secara formal oleh Wali Kota Semarang.

B. PELAKSANAAN PELATIHAN

Program pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) ingin dibangun adalah membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun perencanaan kegiatan instansi serta memimpin pelaksanaannya.

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan selama 908 (sembilan ratus delapan) JP atau setara dengan 105 (seratus lima) Hari Pelatihan; Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dilaksanakan secara *Blended Learning* dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembelajaran Mandiri;
- b. e-learning dengan menggunakan metode pembelajaran daring:
 1. secara langsung (synchronous); dan
 2. secara tidak langsung (asynchronous);
- c. Pembangunan komitmen bersama;
- d. Pembelajaran klasikal tahap I;
- e. Aktualisasi kepemimpinan, yang dilaksanakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yaitu aktualisasi kepemimpinan kinerja; dan -
- f. Pembelajaran klasikal tahap II.

Tahapan waktu pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, adalah sebagai berikut :

NO	TAHAP	WAKTU
1.	Pembelajaran Mandiri	11 s/d 31 Maret
2.	E-Learning	1 s/d 20 April
3.	Pembangunan Komitmen Bersama	21 s/d 23 April
4.	Pembelajaran Klasikal Tahap I	27 April s/d 20 Mei 2026
	Pembukaan	27 April 2026
	Stula	11 s/d 13 Mei
	Seminar Rancangan Aktualisasi	20 Mei
5.	Implementasi Aksi Perubahan	21 Mei s/d 14 Agustus
6.	Pembelajaran Klasikal Tahap II	18 s/d 21 Agustus
	Seminar Aktualisai Proyek Perubahan	19 Agustus
	Penutupan	21 Agustus

C. TEMPAT DAN KEGIATAN PELATIHAN

Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 bertempat di Gedung Graha Wiyata Praja BKPP Kota Semarang Jl. Fatmawati No. 73 A Semarang.

BAB V

EVALUASI KEGIATAN

A. EVALUASI PELATIHAN

Berdasarkan pada Rapat Sidang Kelulusan yang telah dilaksanakan, yang dihadiri oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu, dan Coach dari Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, BKPP Kota Semarang pada tanggal 20 Agustus 2026.

Dengan hasil Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sejumlah 30 orang dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota Semarang dan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dengan kriteria sebagai berikut :

- Sangat Memuaskan sebanyak 6 orang
- Memuaskan sebanyak 24 orang

Bagi peserta PKP yang mendapatkan peringkat 3 besar Pemerintah Kota Semarang Angkatan II Tahun 2026 sebagai berikut :

RANK ING	NAMA / INSTANSI	JUDUL PROPER
1	INDAH MAYANG KARTI, S.FARM. APT., M.M. (Dinas Kesehatan)	Rencana aksi perubahan kualitas pelayanan publik: "PHARMA CITY" (Pelayanan Farmasi Apotek Terintegrasi Kota Semarang)

2	DIAN AMALIASARI, SE (Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan)	Rencana aksi perubahan kualitas pelayanan publik: "ROMANTIS" ronda malam terintegrasi dan sinergis oleh linmas dalam meningkatkan keamanan dan ketentraman di Kelurahan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
3	BUDHI TRI NASRIL, ST (Dinas Pemadam Kebakaran)	Rencana aksi perubahan kualitas pelayanan publik: Sistem informasi geografi pemeriksaan hidran umum, bangunan, kawasan industri dan kawasan pemukiman "(SIGAP HIDRAN)" di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

B. EVALUASI PENYELENGGARAAN

Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara pelatihan dilakukan oleh Tim Evaluator dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Aspek yang dinilai dari penyelenggara Pelatihan, meliputi:

1. Pelayanan kepada peserta, dengan indikator :
 - a. Kelengkapan informasi Pelatihan;
 - b. Ketersediaan dan kebersihan asrama, kelas, ruang makan, toilet, dan prasarana lainnya;
 - c. Ketersediaan, kebersihan dan keberfungsian fasilitas olah raga, kesehatan, tempat ibadah dan sarana lainnya;
 - d. Ketersediaan, kelengkapan dan keberfungsian sarana dan bahan Diklat.

2. Pelayanan kepada Widyaiswara dan tenaga kependidikan lainnya, dengan indikator :

- a. Kelengkapan informasi Pelatihan;
- b. Ketepatan waktu menghubungi Widyaiswara dan tenaga kependidikan lainnya;
- c. Ketersediaan, kelengkapan dan keberfungsian sarana pengajaran dalam kelas.

3. Pengadministrasian Pelatihan, dengan indikator :

- a. Kelengkapan surat menyurat;
- b. Ketersediaan instrumen-instrumen penilaian;
- c. *File* keseluruhan dokumen setelah penyelenggaraan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data evaluasi pasca pelatihan dapat disimpulkan bahwa:

1. Alumni sudah dapat menerapkan sikap dan perilaku Kepemimpinan, menerapkan nilai-nilai ASN Berakhlak, memahami dan menghayati kedudukan dan peran PNS serta fungsi ASN
2. Secara dampak pelatihan, baik dari sisi keterampilan maupun keberlanjutan aktualisasi juga sudah menunjukkan hal yang baik
3. Implementasi aktualisasi dapat terjadi bila adanya dukungan atasan / mentor dan rekan kerja, ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya dan dukungan dari pihak internal dan eksternal.
4. Atasan langsung dan rekan kerja menunjukkan bahwa alumni dapat menerapkan sikap dan perilaku Kepemimpinan, menerapkan nilai-nilai ASN, memahami dan menghayati kedudukan dan peran PNS serta fungsi ASN. Selain itu alumni juga menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, kinerja, kedisiplinan, motivasi, kreatifitas serta peningkatan pengetahuan menjadi lebih baik.
5. Atasan langsung dan rekan kerja juga menunjukkan bahwa aktualisasi yang telah dibuat oleh alumni merupakan suatu hal yang penting untuk dilanjutkan karena akan menambah efektifitas dan efisiensi pekerjaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.



Kepala,
Joko Hartono, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP 197809291997111001